

**PRAKTIK PERLINDUNGAN SOSIAL PEKERJA INFORMAL DI
PERBATASAN RI-RDTL (STUDI PADA PETANI DI NUSA TENGGARA
TIMUR)**

**Dewi Puspita Rahayu¹, Tammara
Nainggolan², Mafatikhul Huda³,
Raffael Lois Rudtyanto⁴.**
^{1,2,3,4}Universitas Brawijaya

Article history

Received : 27 April 2025

Revised : 24 Desember 2025

Accepted : 11 Februari 2026

*Corresponding author

Email : dewi.rahayu@ub.ac.id

No. doi: 10.24198/focus.v9i1.61030

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi praktik perlindungan sosial bagi pekerja informal di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, dengan fokus pada petani di Desa Kabuna, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Masalah utama yang dihadapi pekerja informal meliputi ketidakpastian ekonomi, akses terbatas terhadap layanan sosial, dan kondisi geografis yang sulit. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perlindungan sosial formal dan informal yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan pekerja informal di wilayah perbatasan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan sosial informal, seperti gotong royong dan investasi dalam ternak, masih menjadi andalan utama masyarakat, sementara partisipasi dalam program formal, seperti BPJS, tetap rendah karena minimnya kesadaran, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya sosialisasi. Meskipun beberapa bantuan sosial formal tersedia, efektivitasnya terbatas dalam memenuhi kebutuhan spesifik komunitas. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya pendekatan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berbasis komunitas, disertai dukungan produktif untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko ekonomi dan sosial.

Kata kunci: perlindungan sosial, jaminan sosial, pekerja informal, masyarakat perbatasan

ABSTRACT

This study explores social protection practices for informal workers in the border area between Indonesia and Timor Leste, focusing on farmers in Kabuna Village, Belu Regency, East Nusa Tenggara. The primary issues faced by informal workers include economic uncertainty, limited access to social services, and challenging geographical conditions. The research aims to understand the dynamics of existing formal and informal social protection mechanisms and identify the challenges and needs of informal workers in the border area. Using a qualitative case study method, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that informal social protection mechanisms, such as mutual assistance and livestock investment, remain the primary

reliance of the community, while participation in formal programs, such as BPJS, remains low due to limited awareness, economic constraints, and lack of outreach. Although some formal social assistance programs are available, their effectiveness is limited in meeting the specific needs of the community. The study concludes by emphasizing the importance of a more inclusive and community-based social protection approach, supported by productive assistance to foster the independence of communities in managing economic and social risks.

Key word: *Social protection, Social security, Informal workers, Border communities*

PENDAHULUAN

Perlindungan sosial memiliki peranan krusial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan memitigasi dampak negatif dari ketidakpastian ekonomi dan kehidupan. Melalui berbagai program dan kebijakan, perlindungan sosial membantu melindungi individu dan keluarga dari risiko kemiskinan, penyakit, dan ketidaksetaraan akses pendidikan. Perlindungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, mengurangi disparitas sosial, serta membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya.

Pada dasarnya praktik perlindungan sosial di Indonesia telah terjadi melalui berbagai bentuk. Praktik perlindungan sosial secara informal misalnya mencakup sejumlah mekanisme yang bersifat tradisional dan lokal, sering kali berakar dalam norma-norma sosial dan kearifan lokal. Solidaritas keluarga dan komunitas memainkan peran penting sebagai jaring pengaman pertama bagi individu yang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial. Sistem gotong-royong, di mana anggota masyarakat bersatu untuk memberikan dukungan dalam bentuk materi atau tenaga, sering kali menjadi praktik yang umum. Selain itu, adanya lembaga adat dan

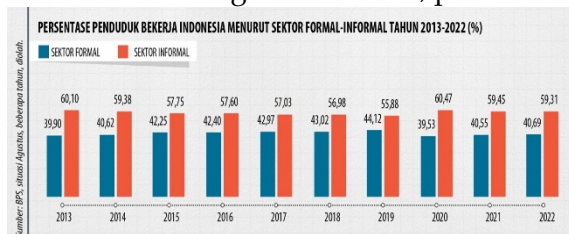
keagamaan juga turut berkontribusi dengan memberikan bantuan kepada anggota komunitas yang membutuhkan. Meskipun praktik ini memiliki kelembagaan informal, mereka mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan saling peduli dalam masyarakat.

Selain praktik perlindungan sosial informal, praktik perlindungan sosial di Indonesia secara formal sudah tercermin dalam berbagai kebijakan dan program bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). PKH memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. BPNT menyediakan bantuan pangan non-tunai kepada keluarga penerima manfaat, sementara JKN memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Sementara untuk bantuan sosial yang bersifat tunai, Indonesia memiliki program-program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin, Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja formal, kartu prakerja untuk mengurangi angka pengangguran dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung akses pendidikan anak-anak miskin.

Selain dalam wujud bantuan sosial, praktik perlindungan sosial di Indonesia juga dikembangkan dalam bentuk asuransi sosial yang dikelola oleh pemerintah. Disusunnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan sistem perlindungan sosial di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur sistem jaminan sosial yang lebih terintegrasi dengan menerapkan prinsip asuransi sosial melalui iuran peserta yang memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan ekonomi dapat terlibat di dalamnya. Sejauh ini, implementasi asuransi sosial di Indonesia masih mengatur tentang jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan dengan lembaga yang mengaturnya yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 24 Tentang BPJS, 2011).

Dari serangkaian praktik perlindungan sosial yang terjadi di Indonesia, praktik perlindungan sosial bagi para pekerja informal di Indonesia perlu mendapatkan perhatian lebih karena masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pekerja di sektor informal adalah tenaga kerja yang memiliki jumlah yang lebih besar dari pada tenaga kerja sektor formal di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia sebagai berikut:

Berdasarkan gambar di atas, persentase



Gambar 1. Persentase Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal tahun 2013-2022. Sumber: (Sanusi, 2023)

jumlah tenaga kerja di sektor informal dari rentang tahun 2013 hingga 2022 selalu

menempati posisi tertinggi jika dibandingkan dengan tenaga kerja sektor formal. Namun demikian, persentase pekerja sektor informal yang mengakses jaminan sosial formal dari negara masih relatif rendah. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan per Kuartal IV (2020 & 2021)

Nama Data	2020 / peser ta	2021 / peserta
Penerima Upah	19.963.696	20.832.255
Jasa Konstruksi	7.521.392	6.276.788
Bukan Penerima Upah	2.494.994	3.551.858

Sumber: (Annur, 2022)

Pada tabel di atas, pada 2021, jumlah kepesertaan sebesar 3.551.858 pekerja sektor informal yang oleh BPJS Ketenagakerjaan dinamai sebagai pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja sektor informal yang mencapai sekitar 77.910.000 jiwa (Sanusi, 2023). Berdasarkan data tersebut, artinya hanya terdapat 4,56% pekerja di sektor informal yang mengakses jaminan sosial formal yang disediakan pemerintah. Sebagian besar pekerja informal di Indonesia, seperti pedagang kaki lima, buruh harian, dan pekerja rumah tangga, sering kali tidak mendapatkan manfaat dari program formal seperti jaminan sosial dan keamanan pekerjaan. Dalam konteks ini, praktik perlindungan sosial informal sering kali berkisar pada jejaring solidaritas komunitas, di mana mereka saling memberikan dukungan finansial atau non-finansial dalam situasi kebutuhan. Selain itu, perkumpulan kerja sektor informal dan organisasi non-pemerintah turut berperan dalam memberikan informasi, pelatihan, dan advokasi untuk meningkatkan kondisi kerja dan akses terhadap hak-hak pekerja. Meskipun ada upaya-upaya ini, tantangan yang signifikan ada pada kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan

pendidikan, serta ketidakpastian pekerjaan dan penghasilan.

Berkaitan dengan hal di atas, praktik perlindungan sosial bagi para pekerja informal di wilayah perbatasan Indonesia merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan unik yang dihadapi oleh komunitas tersebut. Wilayah perbatasan seringkali memiliki kondisi ekonomi yang lebih sulit, akses terbatas terhadap layanan publik, dan ketidakpastian terkait dengan dinamika geopolitik. Demikian juga yang terjadi di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDRTL). Masyarakat eks pengungsi Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih mengalami eksklusi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Sejak konflik sebelum dan sesudah referendum pada 30 Agustus 1999, terdapat 450.000 korban konflik referendum. Sebanyak 240.000 korban merupakan pengungsi lintas batas yang bermigrasi ke Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur), dan 210.000 korban lainnya mengalami eksklusi sosial politik di wilayah Timor Timur dan digolongkan sebagai pengungsi internal atau Internally Displaced Persons (IDPs) (Maksum, 2020).

Kondisi-kondisi tersebut tentu saja mempengaruhi praktik perlindungan sosial masyarakat eks pengungsi terlebih lagi bagi mereka yang bekerja di sektor informal di mana sektor ini pada dasarnya memiliki tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Praktik perlindungan sosial di wilayah perbatasan mungkin saja melibatkan solidaritas lokal dan gotong-royong komunitas, di mana masyarakat setempat berusaha saling mendukung dalam situasi ekonomi sulit atau krisis. Selain itu, organisasi masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, atau koperasi lokal, dapat memainkan peran penting dalam memberikan bantuan, pelatihan, dan sarana pengembangan ekonomi. Namun, tantangan utama melibatkan ketidakpastian pekerjaan, akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan

pendidikan, serta ketidakamanan di wilayah perbatasan.

Penelitian mengenai praktik perlindungan sosial para pekerja informal di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste (RI-RDRTL) diarahkan untuk memahami bentuk, dinamika, tantangan, dan potensi solusi dalam konteks geografis dan sosial yang unik tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merinci praktik perlindungan sosial yang sedang berlangsung, mengidentifikasi ketidakpastian dan kebutuhan pekerja informal di wilayah perbatasan, serta mengevaluasi efektivitas dan aksesibilitas layanan perlindungan sosial yang ada. Dengan memahami secara mendalam dinamika ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan pekerja informal di wilayah perbatasan RI-RDRTL. Dengan pendekatan akademik, penelitian ini juga berusaha untuk memberikan kontribusi teoretis terhadap pemahaman praktik perlindungan sosial dalam konteks perbatasan, yang dapat menjadi landasan bagi kebijakan dan tindakan lebih lanjut. Sebagai upaya menyeluruh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan holistik terhadap tantangan dan potensi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja informal di wilayah perbatasan RI-RDRTL.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena tertentu yang bertumpu pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku secara holistik (utuh). Penelitian ini secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia (peneliti) dan keterlibatan dalam kawasannya sendiri dalam berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya (Furqon, 1992). Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah kualitatif

deskriptif yang lebih mengedepankan pemahaman, interpretasi, dan penjelasan tentang suatu keadaan sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap konteks yang diteliti.

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan berbagai data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data ini dirasa dapat membantu secara efektif pengumpulan data-data yang diinginkan. Beberapa teknik dimaksud antara lain adalah observasi, *in-depth interview*, dan dokumentasi.

Narasumber dalam penelitian ini antara lain para petani selaku pekerja informal yang tinggal di Desa kabuna, dan pihak pemerintah desa.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kabuna Kota Belu. Alasannya adalah Desa Kabuna merupakan wilayah perbatasan yang didiami oleh eks pengungsi Timor-Timur yang sangat rentan dan perlu diperhatikan implementasi perlindungan sosialnya.

Analisis data dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data telah dilakukan secara maksimal dan dirasa cukup untuk dianalisis. Metode analisis menggunakan metode deskriptif analisis untuk menerangkan sebuah kasus. Dalam proses analisis, langkah- langkah analisis melalui pengungkapan hal-hal penting serta pengorganisasian dan penentuan apa yang dilakukan harus dimulai secara sistematis dengan melakukan pemrosesan satuan atau *unityzing*, kategorisasi dan penafsiran data. Langkah-langkah ini adalah proses analisis yang berusaha diterapkan oleh peneliti untuk mengungkapkan dan menjelaskan proses penelitian di mana peneliti menggunakan seluruh kemampuannya untuk memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan terlibat yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

Setelah dibaca dan ditelaah maka langkah berikutnya ialah mengadakan kondensasi data yang dilakukan dengan menggunakan abstraksi. Abstraksi merupakan langkah membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan, satuan-satuan ini kemudian dikategorisasikan, dan terakhir adalah langkah pengecekan keabsahan data. Analisis ini merupakan kroscek ulang terhadap landasan teori yang menjadi titik pijakan penelitian ini. Seperti apa bentuk realitas yang ditemui di lapangan adalah data yang berusaha dipaparkan dan dikroscek langsung dengan kajian teori. Tahap akhir analisis data adalah melakukan langkah penafsiran data dengan melakukan beberapa proses interograsi terhadap data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Kabuna

Desa Kabuna di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh potret kehidupan masyarakat pedesaan yang sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama dalam bertahan hidup. Sebagian besar masyarakat Desa Kabuna bekerja sebagai petani maupun buruh tani. Biasanya warga menggarap lahan seluas 50 hingga 100 are untuk 3-4 orang. Pertanian di Desa Kabuna dijalankan secara tradisional, dengan mayoritas pekerja memperoleh keterampilan bertani dari pengalaman turun-temurun tanpa dukungan teknologi modern atau pendidikan formal. Bagi warga Kabuna, pekerjaan bertani sering dimulai sejak masih muda karena membantu atau sengaja melanjutkan pekerjaan orang tua. Profesi sebagai petani ini tidak hanya sebuah mata pencaharian penopang kehidupan, tetapi juga mencerminkan keterikatan budaya dan identitas sosial masyarakat Desa Kabuna.

Berbagai jenis tanaman yang ditanam oleh petani Desa Kabuna sangat dipengaruhi oleh pola musim yang ada. Ketika musim hujan sebagian besar petani

menanam padi sebagai sumber pangan utama keluarga. Ketika musim kemarau tiba para petani beralih ke tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, kacang panjang, dan bunga kol yang biasanya mereka jual sebagai sumber penghasilan. Beberapa petani juga menanam jagung dan bawang merah sebagai komoditas tambahan. Produktivitas lahan sangat bergantung pada curah hujan yang sering kali tidak dapat diprediksi, sehingga membuat hasil panen menjadi tidak menentu. Pendapatan masyarakat pun bergantung pada harga pasar hasil pertanian yang juga sangat tidak stabil. Sebagai contoh, harga cabai dapat mencapai Rp40.000 per kilogram pada saat harga bagus, tetapi turun drastis menjadi Rp10.000 per kilogram ketika panen raya. Hal tersebut membuat penghasilan petani tidak menentu dari hasil pertanian mereka.

Selain bertani, beberapa warga Desa Kabuna menjalankan usaha sampingan untuk menambah penghasilan. Jenis ternaknya pun beragam, seperti babi, ayam, atau sapi merupakan jenis hewan ternak yang sering dipilih oleh masyarakat Desa Kabuna. Peternakan ini sering digunakan sebagai strategi pengelolaan risiko ekonomi bagi masyarakat Desa Kabuna. Hasil ternak dijadikan sebagai "tabungan hidup" yang dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan atau pengobatan. Sebagai contoh, seorang peternak yang memiliki lima ekor babi dewasa dapat menghasilkan hingga seratus ekor anakan dalam satu siklus produksi, dengan setiap anakan babi mampu dijual seharga Rp1,5 juta. Pendapatan tambahan dari peternakan ini sangat membantu dalam menutupi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh hasil panen, terutama pada saat harga hasil pertanian sedang rendah atau terjadi gagal panen.

Namun, kehidupan masyarakat Desa Kabuna sangat rentan terhadap berbagai macam risiko. Cuaca yang tidak menentu merupakan salah satu kendala utama bagi petani Desa Kabuna. Ketika musim kemarau tiba, petani sangat sulit

mendapatkan pasokan air untuk irigasi lahan pertaniannya. Serangan hama dan penyakit tanaman juga sering kali mengakibatkan gagal panen yang membuat pendapatan petani menurun drastis. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pupuk berkualitas dan kurangnya edukasi tentang teknik pertanian modern semakin memperburuk kondisi para petani. Beberapa petani mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengidentifikasi penyebab gagal panen yang mungkin disebabkan oleh penggunaan pestisida atau pupuk yang tidak tepat. Hambatan-hambatan ini membuat kehidupan petani di Desa Kabuna menjadi sangat bergantung pada dinamika pasar dan kondisi alam yang berada di luar kendali mereka.

Praktik Perlindungan Sosial di Desa Kabuna

Masyarakat Desa Kabuna memiliki berbagai cara dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi, baik melalui program perlindungan sosial formal yang disediakan oleh pemerintah maupun mekanisme informal berbasis komunitas. Program perlindungan sosial formal yang paling dikenal petani Desa Kabuna adalah BPJS Kesehatan. Namun, partisipasi masyarakat dalam program ini masih rendah. Sebagian besar petani mengikuti BPJS Kesehatan melalui skema mandiri, di mana mereka membayar iuran secara rutin. Iuran ini sering kali dianggap membebani, terutama ketika pendapatan mereka berkurang akibat hasil panen yang tidak mencukupi. Selain itu, minimnya akses ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS juga menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan maksimal.

Selain BPJS Kesehatan, beberapa warga juga terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan meskipun jumlah jauh lebih sedikit. Program ini biasanya diikuti oleh perangkat desa atau warga yang memiliki usaha, seperti pemilik warung atau peternak dengan skala besar. Minimnya pemahaman tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan, ditambah dengan biaya iuran yang

dianggap tinggi membuat program ini kurang diminati oleh mayoritas petani kecil di Desa Kabuna. Selain itu, masyarakat Desa Kabuna juga menerima bantuan sosial dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima oleh sebagian masyarakat selama pandemi COVID-19. Bantuan ini dirasa sangat membantu bagi keluarga yang sangat bergantung pada pendapatan hasil pertanian. Namun, distribusi bantuan sering kali tidak merata yang menyebabkan beberapa masyarakat merasa bahwa program-program ini lebih bersifat sementara daripada memberikan solusi jangka panjang.

Selain jaminan formal dari pemerintah, perlindungan sosial informal juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Kabuna. Gotong royong adalah salah satu mekanisme utama yang digunakan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Ketika salah satu anggota masyarakat menghadapi kesulitan, seperti gagal panen atau kebutuhan mendesak, tetangga dan kerabat sering kali memberikan bantuan berupa uang, tenaga, atau hasil panen. Hal ini memperlihatkan kuatnya nilai-nilai solidaritas dan kekerabatan dalam komunitas pedesaan. Selain gotong royong, tabungan pribadi dan investasi dalam bentuk ternak juga menjadi strategi dalam perlindungan sosial informal. Hewan ternak seperti babi, ayam, dan sapi sering dijadikan "tabungan hidup" yang dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Misalnya, seorang petani yang memiliki beberapa ekor babi dapat menjual salah satu ternaknya untuk membiayai pengobatan atau membeli pupuk untuk pertaniannya.

Kelompok tani juga memainkan peran dalam mendukung perlindungan sosial informal. Selain menjadi wadah untuk berbagi informasi dan pengalaman, kelompok tani juga membantu anggotanya mengelola risiko secara kolektif. Kelompok tani berfungsi sebagai tempat untuk saling membantu dalam menghadapi masalah teknis, seperti serangan hama atau kekeringan. Dalam beberapa hal, kelompok tani bahkan menjadi perantara antara

masyarakat dan pemerintah dalam mengakses bantuan atau program perlindungan sosial formal. Meskipun perlindungan sosial informal telah membantu masyarakat Desa Kabuna bertahan di tengah berbagai tantangan, hal ini memiliki keterbatasan. Bantuan yang diberikan oleh tetangga atau kerabat sering kali hanya bersifat sementara dan dalam skala kecil.

Bentuk Ketidakpastian Jaminan Sosial

Pendapatan masyarakat Kabuna yang masih sangat bergantung pada sektor informal seperti pertanian membuat posisi masyarakat selalu berada diambang ketidakpastian. Hasil panen yang masih bergantung pada faktor cuaca di wilayah tersebut membuat masyarakat memiliki penghasilan yang tidak pasti. Ketika cuaca panas masyarakat hanya bisa menanam tanaman sayur dengan penghasilan yang juga bergantung dengan harga pasar. Sayuran seperti kacang panjang, bunga kol, cabai, tomat, dan bawang menjadi pilihan dari masyarakat untuk ditanam ketika cuaca panas tiba. Berbeda ketika musim hujan tiba, masyarakat akan beralih ke sektor pertanian dengan menanam padi dengan hasil panen yang juga beragam tergantung luas lahan pertanian yang dimiliki. Dengan harga yang relatif murah, masyarakat Desa Kabuna selalu dihadapkan pada situasi yang dilematis karena penjualan hasil panen di pasar tidak serta merta memberikan keuntungan sesuai yang diharapkan.

Harga di pasar seringkali mengalami perubahan yang tidak menentu sehingga berdampak langsung pada keuntungan yang didapatkan masyarakat Desa Kabuna. Pendapatan yang tidak menentu tersebut diperparah dengan perbedaan kepemilikan luas lahan dari masing-masing individu di Desa Kabuna. Tidak jarang terdapat masyarakat yang menggarap lahan secara bersama karena tidak memiliki lahan yang cukup luas sehingga ketika hasil panen sudah terjual, keuntungan yang didapat masih harus dibagi sesuai dengan jumlah penggarap yang ada. Situasi ini mencerminkan semangat gotong royong

dan solidaritas yang baik diantara masyarakat Desa Kabuna, namun di sisi lain juga mempersulit kesempatan dari masyarakat Desa Kabuna untuk memperoleh keuntungan yang pasti. Kenyataan tersebut mencerminkan adanya hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Kabuna dalam menjalankan aktivitas pertanian di daerah perbatasan Indonesia.

Dalam realitasnya, hambatan yang dialami oleh para petani di Desa Kabuna lebih kompleks dan beragam bentuknya seperti akses yang sulit terhadap bahan pertanian seperti pupuk dan bibit tanaman yang hendak dikelola, proses tanam yang harus menyesuaikan dengan cuaca apalagi di musim kemarau sangat rentan terhadap kekeringan. Kemudian, adanya serangan hama pada waktu tertentu yang tentu saja merugikan perolehan hasil panen yang diharapkan oleh masyarakat. Hambatan yang lain adalah kemampuan dan kepemilikan modal yang berbeda antar individu sehingga mempengaruhi sistem pengelolaan pertanian. Hal tersebut juga menjadi salah satu hambatan baru karena muncul kesenjangan sosial antar masyarakat. Selain itu, minimnya edukasi dan sosialisasi terkait langkah pencegahan gagal panen juga masih terbatas sehingga secara tidak langsung dapat menciptakan sebuah kesenjangan baru akibat tidak meratanya edukasi pertanian kepada seluruh masyarakat Desa Kabuna. Edukasi dan sosialisasi yang masif sejatinya dapat menjadi sebuah langkah solutif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Kabuna dalam menjalankan usaha pertaniannya, namun karena keterbatasan yang ada proses edukasi tidak dapat berjalan dengan mudah.

Hambatan lain yang paling sering dialami oleh masyarakat Desa Kabuna dan kebanyakan petani yang lain adalah fluktuasi harga di pasar. Harga yang ada di pasaran tidak menentu tergantung permintaan dan penawaran yang ada mengakibatkan keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat Desa Kabuna cenderung tidak stabil. Ketika musim panen raya, harga cenderung turun karena

meningkatnya jumlah penawaran yang disediakan oleh para petani dan sebaliknya ketika jumlah pasokan penawaran menurun dan permintaan meningkat harga cenderung akan naik. Keseragaman mata pencaharian dan sumber penghasilan juga dapat menjadi salah satu indikator hadirnya fluktuasi harga di pasar. Dengan masa tanam dan panen yang hampir bersamaan, pasokan bahan makanan yang dijual di pasar juga akan meningkat. Hal ini tentu menjadi masalah apabila faktor permintaan relatif sama sehingga harga jual di pasar ikut menurun. Kurangnya bantuan dari pemerintah dan kebijakan yang seimbang untuk pemeratakan cakupan pasar juga menjadi faktor pendukung harga di pasar cenderung tidak stabil dan berdampak pada kerugian dari para petani termasuk masyarakat Desa Kabuna.

Fluktuasi harga yang terjadi di pasar tersebut mendorong masyarakat Desa Kabuna kepada situasi yang tidak pasti dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan harga yang seringkali tidak terduga memberikan dampak langsung kepada masyarakat dalam menyusun perencanaan keuangan harian maupun jangka panjang. Pemenuhan kebutuhan pokok sebagian masyarakat Desa Kabuna juga belum maksimal dikarenakan pendapatan yang tidak stabil. Ketidakpastian tersebut tentu mempengaruhi aspek sosial masyarakat dimana bisa terjadi kecemasan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

Kebutuhan Pekerja di Wilayah Perbatasan

Kondisi ketidakstabilan perekonomian warga yang bekerja di sektor informal terkhusus mereka yang bermata pencaharian sebagai petani juga perlu melihat pentingnya keberadaan jaminan sosial bagi masyarakat Desa Kabuna. Jaminan sosial yang bisa menjadi alternatif bagi masyarakat ketika dihadapkan pada situasi yang mendesak seperti ketidakjelasan harga, kekurangan pasokan bahan pertanian, dan situasi yang menimbulkan kecemasan lainnya menjadi langkah yang bisa diambil oleh masyarakat.

Adanya subsidi bahan pokok, bantuan langsung tunai, maupun program-program kartu sembako merupakan beberapa contoh dari jaminan sosial yang menjadi penopang utama bagi masyarakat Desa Kabuna yang dikelilingi dengan berbagai situasi yang tidak pasti. Melalui berbagai bentuk jaminan sosial yang ada, setidaknya masyarakat dapat sedikit bernapas untuk tetap memenuhi kebutuhan dasarnya meskipun situasi yang dialami tidak menentu seperti fluktuasi harga di pasar. Namun, berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan memperlihatkan situasi yang berbeda. Kebanyakan masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap jaminan sosial sehingga tidak banyak yang memiliki jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah seperti BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Implementasi program jaminan sosial oleh pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat berjalan dengan baik pada masyarakat Desa Kabuna karena minimnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kehadiran jaminan sosial. Berdasarkan data yang diperoleh masyarakat cenderung tidak mengetahui tentang mekanisme dari program jaminan sosial tersebut. Proses sosialisasi yang kurang juga diperparah dengan beberapa tantangan dalam menyediakan program jaminan sosial bagi masyarakat seperti kriteria yang harus dipenuhi, prosedur administrasi yang rumit, dan iuran bulanan yang tidak semua masyarakat dapat membayarkannya. Kondisi tersebut menciptakan kerentanan dan kecenderungan adanya masyarakat yang terabaikan oleh pemerintah sehingga masyarakat Desa Kabuna yang bekerja di sektor informal berada di situasi pemenuhan kebutuhan dasar yang terbatas. Akses informasi yang terbatas menyebabkan keikutsertaan masyarakat Desa Kabuna dalam program BPJS Ketenagakerjaan belum maksimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, masyarakat Desa Kabuna yang berpartisipasi dalam program BPJS

Ketenagakerjaan adalah mereka yang tergabung sebagai perangkat desa atau bekerja di instansi pemerintahan desa. Tentunya hal ini menjadi sebuah realita yang cukup memprihatinkan mengingat kondisi sebagian besar masyarakat Desa Kabuna sebagai pekerja informal yang rentan terhadap ancaman kemiskinan dan ketidakpastian pemenuhan kebutuhan di wilayah perbatasan.

Aksesibilitas dan Efektivitas Layanan Perlindungan Sosial yang Ada

Pada masyarakat Desa Kabuna khususnya petani sebagai pekerja di sektor informal tentunya banyak mengalami dinamika dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang petani. Perlindungan sosial menjadi penting bagi mereka akan ketidakpastian ekonomi dan kehidupan apalagi ditambah dengan lokasi geografis mereka sebagai eks pengungsi yang tinggal di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL). Berdasarkan kerentanan yang dialami petani untuk kehidupan dan masa depannya, memiliki perlindungan sosial menjadi hal yang krusial.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial ini sendiri harus dimiliki terlebih dulu oleh para petani. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan diketahui bahwa para petani sendiri sudah memiliki kesadaran akan pentingnya suatu jaminan untuk meminimalisir resiko sosial seperti apabila ada musibah melanda keluarga, berjaga-jaga saat sakit, adanya ketakutan program kesehatan Pemerintah Belu ditarik secara tiba-tiba dan berjaga-jaga untuk hal-hal tidak terduga lainnya di masa depan.

Akan tetapi, kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial pada para petani ini tidak serta merta diikuti dengan kesadaran akan kepesertaan pada asuransi sosial. Jenis asuransi sosial yang dimiliki sangat bergantung pada tingkat ekonomi petani. Untuk petani dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, asuransi yang dimiliki umumnya berasal dari pemerintah seperti BPJS, Jamkesmas, dan juga program kesehatan gratis dari Pemerintah

Kabupaten Belu. Selain itu, terdapat informan yang bahkan belum mengetahui terkait apa itu asuransi sosial.

Selanjutnya untuk petani dengan tingkat ekonomi menengah ke atas umumnya sudah mengenal terkait asuransi dan sudah tergabung seperti pada BPJS Ketenagakerjaan dan mengikuti asuransi swasta. Artinya, aksesibilitas terhadap jaminan perlindungan sosial masih belum merata tergantung pada tingkat ekonomi yang dimiliki para petani. Hal ini karena pada beberapa petani masih mengalami kesulitan finansial yang mempengaruhi modal untuk mengelola pertanian. Ketika petani bahkan tidak memiliki modal untuk pengelolaan pertaniannya, tentunya menjadi hal yang sulit baginya dalam mengakses jaminan perlindungan sosial.

Selama ini, terdapat pula beberapa cara yang dilakukan para petani maupun antisipasinya terhadap resiko sosial. Yang pertama adalah dengan cara menabung baik di koperasi maupun di Bank. Selain itu terdapat pula informan yang memiliki tabungan dalam bentuk investasi tanah. Kedua, antisipasi yang dilakukan oleh beberapa informan yaitu dengan mengikuti asuransi sosial. Dan yang ketiga adalah memiliki usaha sampingan. Usaha sampingan yang biasa dimiliki oleh petani adalah dengan memelihara ternak sehingga bisa dijual apabila suatu waktu memerlukan uang secara mendadak.

Bentuk atau mekanisme jaminan sosial yang lebih banyak dipraktikkan oleh petani di Desa Kabuna adalah bersifat formal dengan cara berelasi langsung dengan lembaga jaminan sosial atau keuangan. Umumnya para petani melakukan pinjaman pada lembaga keuangan yaitu Bank BRI dengan skema KUR. Praktik perlindungan sosial secara informal kurang dilakukan oleh masyarakat karena nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat tidak mendukung terselenggaranya praktik jaminan sosial secara informal tersebut. Pada masyarakat Desa Kabuna, meskipun memiliki relasi saudara atau teman karib, tidak serta merta membuat para petani ini mau meminjam pada keluarga dikarenakan

harus membayar dengan bunga yang besar. Sehingga para petani lebih memilih untuk melakukan pinjaman ke Bank daripada kepada saudara, tetangga atau temannya atau dari rekan kelompok tani.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kebanyakan petani hanya bergantung pada jaminan sosial yang berasal dari pemerintah. Bantuan-bantuan pada petani juga hanya berasal dari pemerintah seperti pemberian pompa air, perpipaan, BLT, bibit, obat-obatan untuk semprot hama, dan plastik mursa. Dari pihak swasta ataupun LSM sendiri tidak ada bantuan yang ditujukan pada para petani ini.

Berdasarkan identifikasi hambatan yang dialami oleh petani, diketahui bahwa para petani ini lebih membutuhkan bantuan sosial yang sifatnya dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka daripada bantuan yang bersifat konsumtif. Seluruh informan secara kompak menjawab bahwa dalam hal pertanian mereka lebih membutuhkan bantuan yang mendukung kegiatan pertanian seperti bibit-bibitan, obat pestisida, mesin air ataupun traktor dibandingkan dengan bantuan dalam bentuk uang. Hal ini menunjukkan semangat bekerja yang tinggi oleh para petani dan tidak mau berpangku pada bantuan uang. Artinya, para petani memiliki pemikiran untuk menuju kemandirian pertaniannya sendiri.

Pemerintah mungkin telah memberikan subsidi berupa pupuk dan alat-alat pertanian kepada petani. Namun sebagaimana yang disampaikan Darodjat dalam artikelnya, langkah ini belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan petani. Diperlukan kebijakan subsidi yang lebih efektif, seperti subsidi harga langsung kepada petani agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari hasil panen (Darodjat, 2024).

Selain dalam wujud bantuan sosial, praktik perlindungan sosial di Indonesia juga dikembangkan dalam bentuk asuransi sosial yang dikelola oleh pemerintah salah satunya yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa tidak semua

petani memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan. Adapun petani yang menjadi peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan biasanya karena merupakan pekerja pada suatu instansi. Sebagian dari informan juga hanya mengenal terkait BPJS Kesehatan saja.

Untuk petani yang mengetahui terkait asuransi sosial BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki pemerintah berpendapat bahwa program ini merupakan program yang baik dan setuju dengan keberadaan asuransi sosial ini. Dan bagi para petani yang sudah mengikuti program ini menyampaikan perasaan puas terhadap fungsi-fungsi dari program BPJS. Namun demikian, para petani mengharapkan program ini harus disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kabuna agar dapat aksesibel terhadap berbagai kalangan.

Selama ini, keikutsertaan masyarakat dalam dua jenis BPJS yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan masih belum optimal. Hal ini karena aksesibilitas masyarakat terhadap BPJS masih tergolong dalam kategori rendah yang disebabkan kurangnya sosialisasi terkait BPJS kepada masyarakat. Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi salah penyebab pertimbangan dalam mengikuti BPJS. Besaran iuran BPJS menjadi pertimbangan terbesar petani dalam mengikuti program ini. Skema penggunaan/kepesertaan BPJS petani yang selama ini dilakukan sebagai pekerja informal adalah melalui skema peserta mandiri. Petani yang terlilit hutang atau keadaan ekonomi yang pas-pasan akan berpikir berkali-kali untuk mengikuti skema mandiri ini. Dan bagi mereka yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, memilih untuk mengikuti jaminan kesehatan dari pemerintah setempat.

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi pada petani di Desa Kabuna, menjadi penting bagi lembaga asuransi sosial BPJS untuk melakukan peningkatan kepesertaan masyarakat melalui sistem "jemput bola". Hal ini dikarenakan umumnya masyarakat yang tidak mengikuti program asuransi

sosial karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait jaminan perlindungan sosial. Sehingga perlu mengencangkan sosialisasi secara langsung dengan pendekatan khusus pada masyarakat. Selain itu, hal krusial lainnya adalah penting bagi BPJS untuk memberikan aksi nyata yang dapat membuat masyarakat percaya bahwa BPJS adalah lembaga resmi dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja informal di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Desa Kabuna, menghadapi tantangan yang kompleks terkait aksesibilitas dan efektivitas. Sebagian besar pekerja informal belum memanfaatkan program jaminan sosial formal seperti BPJS secara optimal, terutama karena rendahnya kesadaran, keterbatasan ekonomi, dan minimnya sosialisasi. Sebaliknya, mekanisme informal seperti gotong royong dan investasi dalam bentuk ternak tetap menjadi andalan masyarakat untuk menghadapi risiko sosial dan ekonomi.

Kondisi geografis dan ekonomi di wilayah perbatasan menambah kerentanan masyarakat, termasuk ketidakpastian pendapatan akibat fluktuasi harga pasar dan ketergantungan pada kondisi alam. Meskipun terdapat upaya perlindungan sosial formal, seperti bantuan pemerintah dan program asuransi sosial, efektivitasnya masih terbatas oleh ketidaksesuaian dengan kebutuhan spesifik komunitas perbatasan. Berdasarkan hasil penelitian, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk menekankan pentingnya pendekatan terpadu yang lebih inklusif dan berbasis komunitas guna meningkatkan kesejahteraan pekerja informal, serta perlunya dukungan berupa bantuan produktif untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko sosial dan ekonomi.

Diperlukan upaya meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas, seperti melalui

sistem "jemput bola" oleh BPJS, serta penyediaan program yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi petani. Selain itu, bantuan yang mendukung produktivitas, seperti bibit, alat pertanian, dan mesin, dinilai lebih bermanfaat daripada bantuan konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

Annur, C. M. (2022). *Jumlah Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan per Kuartal IV (2020 & 2021)*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2022/02/14/peserta-aktif-bpjs-tk-capai-3066-juta-orang-pada-2021>

Christiyanto, M., & Mayulu, H. (2021). PENTINGNYA PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI WILAYAH PERBATASAN DALAM UPAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL: STUDI KASUS DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN. *Journal of Tropical AgriFood*, 3(1), 1-14. <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/19114/5041-17283-2-PB.pdf?sequence=1>

Darodjat, R., Maulana, I., dan Hazar, K. (2024). PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI SUBSIDI HARGA BERAS SEBAGAI UPAYA KEDAULATAN PANGAN. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 7 No. 2, 176 – 186. No. Doi: 10.24198/focus.v7i2.53366

Department for International Development. (1999). *International Development Target Strategy Paper: Economic Well-Being. Consultation Document*. Overseas Development Institute.

Grosh, M. (2008). *For Protection and Promotion, The Design and Implementation of Effective Safety Nets*. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

International Labour Organization. (1984). *Introduction to Social Security* (3rd ed.). International Labour Office.

Maksum, A. W. A. P. J. H. P. (2020). Demokrasi dan Kekuasaan Adat: Potensi Eksklusi Akses Dana Desa bagi Eks Pengungsi Timor-Leste. *Society*, 8(2), 496-511. <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/154>

Ortiz, I. (2001). *Social Protection in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank.

Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS, Pub. L. No. 24 (2011).

Rani, F. (2012). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. *Jurnal Transnasional*, 4(1). <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/79/73>

Sanusi, A. (2023). *Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Pasca Covid 19*.

Scott, Z. (2012). *Topic Guide on Social Protection*. Governance and Social Development Resource Center.

United Nations Children's Fund. (2012). *UNICEF Social Protection Strategic Framework: Integrated Social Protection Systems*. United Nations Children's Fund.

Van Ginneken, W. (1999). Social Protection Concepts and Approaches: Implications for Policy and Practice in International Development. In Overseas Development Institute. (Ed.), *Social Protection Concepts and Approaches: Implications for Policy and Practice in International Development*. Overseas Development Institute.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan per Kuartal IV (2020 & 2021)	3
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Persentase Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal tahun 2013-2022.....	3
---	---